

## **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Pangurdotan**

**Putri Sitompul<sup>1✉</sup>, Rimbun C.D. Sidabutar<sup>2</sup>, Magdalena J. Siringoringo<sup>3</sup>**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan di Desa Pangurdotan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan SAP serta kontribusinya terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan aparatur desa sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa, yang ditandai dengan laporan yang lebih rapi, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak pengawas. Faktor internal, seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan komitmen aparatur desa, serta faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, pendampingan, dan pelatihan, terbukti berperan penting dalam keberhasilan penerapan SAP. Selain itu, penerapan SAP juga meningkatkan akuntabilitas, meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi dalam pencatatan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penerapan SAP memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi laporan keuangan, kompetensi aparatur, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa

### **Abstract**

*This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Government Accounting Standards (SAP) and their impact on the transparency of financial statements in Pangurdotan Village. This study also identifies internal and external factors affecting the implementation of SAP and their contribution to improving the transparency of village financial statements. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials as research informants. The results show that the implementation of SAP has a positive effect on the quality of village financial statements, as indicated by reports that are more organized, systematic, and easier for the public and supervisory parties to understand. Internal factors, such as human resource competence, organizational culture, and the commitment of village officials, as well as external factors, such as government regulations, assistance, and training, were found to play important roles in the successful implementation of SAP. In addition, the implementation of SAP improves accountability, minimizes the risk of errors and manipulation in financial recording, and increases public trust in village financial management. Therefore, the implementation of SAP has a strategic role in realizing professional, transparent, and accountable village financial management.*

**Keywords:** Government Accounting Standards, financial statement transparency, officials' competence, accountability, village financial management

---

Copyright (c) 2026 Putri Sitompul

✉ Corresponding author : Putri Sitompul

Email Address : [putri.sitompul22@uhn.ac.id](mailto:putri.sitompul22@uhn.ac.id)

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan sektor publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks sektor publik, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat (Bastian, 2010; Mardiasmo, 2016). Melalui sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan standar akuntansi yang baku menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada akuntabilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mahmudi, 2015).

Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman resmi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Penerapan SAP bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan pemerintah dapat lebih mudah dipahami, dibandingkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Penerapan standar ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah karena setiap transaksi dicatat dan dilaporkan sesuai prinsip yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam hal ini, Nugraheni dan Subaweh (2008) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga implementasi SAP menjadi aspek penting dalam reformasi pengelolaan keuangan publik.

Penerapan SAP tidak hanya relevan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah desa. Sejak meningkatnya alokasi Dana Desa, pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel, dan transparan. Laporan keuangan desa bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta efektivitas pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal (Ardiyanti, 2019). Dengan demikian, penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan desa memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Secara konseptual, penerapan SAP yang baik berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Transparansi menghendaki agar informasi keuangan disajikan secara terbuka, jujur, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh penggunaan anggaran publik (Mardiasmo, 2016; Mahmudi, 2015). Dalam penelitian terdahulu, Rahayu dan Sari (2019) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, Putra et al. (2021) juga menjelaskan bahwa penerapan SAP berkontribusi terhadap peningkatan transparansi keuangan pemerintah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP sangat berkaitan dengan kualitas tata kelola keuangan yang dihasilkan.

Meskipun demikian, penerapan SAP pada tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Kompetensi aparatur yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pengklasifikasian, maupun penyajian laporan keuangan. Penelitian Ilhami dan Widhiastuti (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Hal serupa juga dikemukakan oleh Putri (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas aparatur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi SAP di tingkat desa.

Selain kompetensi aparatur, penerapan SAP juga dipengaruhi oleh dukungan sistem pengendalian internal, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan desa, keberadaan sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan kesalahan dan penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa setiap prosedur pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Komitmen pimpinan desa juga memegang peran penting karena kepala desa merupakan aktor utama yang menentukan arah kebijakan, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi salah satu instrumen pendukung dalam meningkatkan ketepatan, efisiensi, dan keteraturan pencatatan keuangan desa. Sinulingga (2024) menegaskan bahwa penerapan Siskeudes memiliki peran dalam mewujudkan good governance di tingkat desa, sehingga pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi SAP.

Faktor lain yang turut memengaruhi penerapan SAP adalah aspek kelembagaan dan pengawasan. Dalam praktiknya, efektivitas implementasi standar akuntansi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh dukungan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Kartikaningtyas dan Abdurahim (2023) menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesiapan organisasi dan dukungan implementasi. Sementara itu, Siregar (2020) juga menjelaskan bahwa penerapan SAP pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif dan kelembagaan yang berkaitan dengan kesiapan aparatur serta sistem pendukung. Dalam konteks desa, lemahnya pengawasan dan pembinaan dapat menyebabkan penerapan SAP hanya dilakukan sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tanpa benar-benar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengelolaan dana desa yang baik juga erat kaitannya dengan efisiensi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat. Sari dan Hermanto (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian administratif memiliki pengaruh terhadap efisiensi alokasi dana desa. Sementara itu, Ardiyanti (2019) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan desa yang transparan tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap partisipasi publik dan kualitas pembangunan desa. Dengan adanya keterbukaan informasi keuangan, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif dan mendorong pemerintah desa untuk mengelola dana publik secara bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan SAP di tingkat desa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan. Namun, penelitian yang secara khusus menelaah faktor-faktor tersebut dalam konteks desa tertentu masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada tingkat pemerintah daerah atau berfokus pada aspek kualitas laporan keuangan secara umum. Oleh karena itu, kajian yang menelaah penerapan SAP dan dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan pada tingkat desa tetap memiliki urgensi akademik dan praktis, khususnya untuk memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lapangan.

Desa Pangurdotan sebagai salah satu desa yang mengelola Dana Desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, masih dimungkinkan adanya berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan perlunya penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat keberhasilan penerapan SAP sekaligus berdampak pada transparansi laporan keuangan desa. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah agar informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas. Dalam konteks akuntansi sektor publik, SAP menjadi instrumen penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Bastian (2010) menjelaskan bahwa SAP memiliki kekuatan normatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah karena standar ini mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Sejalan dengan itu, Mahmudi (2015) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik memerlukan sistem pelaporan yang terstandar agar pertanggungjawaban kepada publik dapat dilakukan secara jelas dan sistematis.

Dalam regulasi nasional, SAP dipahami sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih komprehensif dibandingkan basis kas, sehingga kondisi keuangan pemerintah dapat digambarkan secara lebih utuh. Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008), penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena mampu meningkatkan keteraturan, konsistensi, dan keandalan informasi keuangan. Oleh karena itu, SAP tidak hanya dipahami sebagai ketentuan

administratif, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengawasan publik.

Pada level pemerintahan desa, penerapan SAP menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya pengelolaan Dana Desa dan tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan SAP dalam konteks desa merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, profesional, dan transparan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan SAP dalam organisasi sektor publik tidak berlangsung secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan implementasinya. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kualitas sumber daya manusia. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai dalam bidang akuntansi pemerintahan cenderung lebih mampu menerapkan SAP secara tepat dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Ilhami dan Widhiastuti (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Temuan ini diperkuat oleh Putri (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, khususnya ketika diikuti dengan pemahaman terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Selain kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan dukungan pimpinan juga menjadi faktor penting dalam penerapan SAP. Pimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk budaya kerja, menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendorong aparatur agar menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai standar. Komitmen organisasi yang kuat akan memperkuat pelaksanaan prosedur akuntansi dan meningkatkan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Ilhami dan Widhiastuti (2022) menegaskan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa, yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dalam mendukung proses tersebut.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penerapan SAP adalah sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu pemerintah desa meminimalkan kesalahan, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prosedur. Dalam konteks ini, Ilhami dan Widhiastuti (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas laporan dana desa. Sementara itu, Putri (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memerlukan dukungan sistem yang memadai, baik dalam bentuk pengawasan internal maupun sarana teknologi yang mampu menunjang proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif.

Penerapan SAP di tingkat desa juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, pembinaan, serta dukungan regulasi. Kartikaningtyas dan Abdurahim (2023) menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kesiapan institusi dalam melaksanakan standar tersebut. Sejalan dengan itu, Siregar (2020) menyatakan bahwa penerapan SAP dipengaruhi oleh faktor administratif, pemahaman regulasi, dan kesiapan aparatur. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini berarti bahwa keberhasilan implementasi SAP tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam menyiapkan aparatur, sistem kerja, dan dukungan operasional yang memadai agar standar tersebut dapat dijalankan secara konsisten.

### **Transparansi Laporan Keuangan Desa**

Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola sektor publik karena berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya berarti tersedianya informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan isi, kelengkapan data, dan kemampuan masyarakat untuk memahami informasi yang disampaikan. Mahmudi (2015) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pelayanan publik yang memungkinkan semua pihak memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan memadai. Mardiasmo (2016) juga menekankan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi laporan keuangan menjadi sangat penting karena dana yang dikelola desa bersumber dari publik dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ardiyanti (2019) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan keterbukaan informasi, kejelasan dokumen, kemudahan akses informasi, dan keterbukaan proses pengelolaan anggaran. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan desa tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat dan legitimasi pemerintah desa.

Transparansi laporan keuangan juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya asas keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan yang valid, lengkap, dan mudah diakses, baik melalui musyawarah desa, publikasi dokumen, maupun media informasi lainnya. Ardiyanti (2019) menegaskan bahwa indikator transparansi mencakup aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan desa merupakan variabel penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus menjadi ukuran sejauh mana pemerintah desa menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

## Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Transparansi Laporan Keuangan Desa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan transparansi laporan keuangan desa karena SAP memberikan pedoman yang jelas mengenai proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Ketika SAP diterapkan secara konsisten, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih sistematis, terstandar, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Kondisi ini akan mendukung terciptanya transparansi karena informasi keuangan dapat disajikan secara lebih terbuka, lengkap, dan dapat diuji. Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Rahayu dan Sari (2019) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Hubungan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Putra et al. (2021), yang menyatakan bahwa penerapan SAP berdampak pada peningkatan transparansi keuangan pemerintah. Artinya, semakin baik penerapan SAP, maka semakin besar peluang bagi pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang terbuka, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dipandang memengaruhi penerapan SAP, sedangkan penerapan SAP selanjutnya dipandang berkontribusi terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan. Dengan demikian, kajian pustaka ini menegaskan bahwa transparansi laporan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari kualitas penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangurdotan, Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Pangurdotan merupakan entitas pemerintahan desa yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Februari 2025 sampai Maret 2026.

Subjek penelitian ini adalah aparatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa Pangurdotan. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa Pangurdotan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

masyarakat. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan SAP dan transparansi laporan keuangan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, proses penyusunan laporan keuangan desa, serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dan dokumen administrasi lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang mendukung pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, perwakilan BPD, dan masyarakat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai penerapan SAP, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan desa. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan desa untuk mengetahui kesesuaian praktik yang dilakukan dengan ketentuan SAP. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP dan dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan kondisi yang terjadi di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola hubungan yang ditemukan antara faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP dengan tingkat transparansi laporan keuangan desa. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan SAP di Desa Pangurdotan serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Desa Pangurdotan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan Desa Pangurdotan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1), yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan

asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam praktiknya, aparat Desa Pangurdotan telah menerapkan sistem pencatatan akuntansi berbasis komputer. Bagian keuangan desa melakukan pencatatan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Penerimaan, dan Buku Kas Pembantu Pengeluaran dengan bantuan program Microsoft Excel. Kepala Desa Pangurdotan, Bapak Galman Sitompul, menyatakan bahwa penerapan SAP telah terlaksana dan laporan keuangan desa juga dapat diakses melalui website desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangurdotan, Galman Sitompul, diperoleh informasi bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di desa tersebut telah berjalan. Beliau menyampaikan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Beliau juga menjelaskan bahwa seluruh tugas pencatatan pendapatan maupun pengeluaran diserahkan kepada bendahara desa karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara. Namun demikian, dalam penyusunan pelaporan, pemerintah desa masih memperoleh bantuan dari pihak kecamatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan. Pelaporan tersebut dipandang sebagai tahap yang sangat penting karena menjadi syarat dalam pengajuan pencairan dana tahap berikutnya. Dalam pelaksanaannya, laporan yang pertama kali disusun adalah laporan rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa dari tahap awal sampai akhir. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, pemerintah desa kembali menyusun laporan realisasi anggaran, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan administrasi lainnya yang berkaitan dengan permohonan dan dokumen pendukung.

Lebih lanjut, Galman Sitompul juga menjelaskan bahwa staf administrasi dan keuangan di Desa Pangurdotan yang menangani pencatatan transaksi, termasuk transaksi yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, telah menerapkan sistem akuntansi berbasis komputer sesuai dengan prinsip-prinsip SAP. Pencatatan dilakukan menggunakan program Microsoft Excel sehingga seluruh transaksi keuangan dapat dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Berbagai laporan yang disusun meliputi Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran per kegiatan hingga bulanan, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut beliau, penerapan sistem ini menjadikan pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta memudahkan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait.

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas di Desa Pangurdotan, sedangkan Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Buku Kas Pembantu Pengeluaran digunakan untuk mencatat setiap sumber pemasukan dan transaksi pengeluaran yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Buku Kas Umum sesuai dengan APBDesa. Semua sumber pendapatan desa, baik yang berasal dari Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, maupun pajak dan retribusi, dicatat dengan sistem akuntansi terkomputerisasi yang sesuai dengan prinsip SAP. Pemerintah Desa Pangurdotan juga secara bertahap telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID), yang membantu proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan sistem ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan desa serta memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pangurdotan, yang sebelumnya mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pada praktiknya dapat diselaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (KAPP). Dalam KAPP, prinsip pengelolaan keuangan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan. Penerapan prinsip transparansi di Desa Pangurdotan terlihat dari adanya keterbukaan informasi keuangan desa, di mana masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Dari hasil penelitian, penerapan prinsip akuntansi pemerintah di Desa Pangurdotan dapat dilihat melalui empat aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pada aspek pengakuan, Bendahara Desa Pangurdotan, Bapak Fernando Simbolon, menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, selalu dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Menurut beliau, setiap dana yang masuk maupun keluar, baik dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, maupun pajak dan retribusi, dicatat secara sistematis agar dapat diakui dalam laporan keuangan desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aset, kewajiban, pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercatat dengan tepat.

Pada aspek pengukuran, Kepala Desa Pangurdotan, Galman Sitompul, menjelaskan bahwa pengukuran nilai transaksi dilakukan berdasarkan nilai historis atau jumlah nominal yang sebenarnya. Beliau menegaskan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat sesuai nilai asli transaksinya. Dalam mendukung ketepatan pengukuran tersebut, pemerintah desa menggunakan sistem komputerisasi melalui Microsoft Excel serta aplikasi Siskeudes dan SID agar pencatatan menjadi lebih akurat dan efisien.

Pada aspek penyajian, Galman Sitompul menyampaikan bahwa laporan keuangan desa disusun secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Menurut beliau, laporan keuangan desa disajikan melalui APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran tiap kegiatan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan dalam bentuk tersebut memudahkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memahami alokasi anggaran serta realisasi belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, pada aspek pengungkapan, Bendahara Desa Pangurdotan, Fernando Simbolon, menjelaskan bahwa pemerintah desa menyertakan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan rincian pendapatan dan belanja desa serta prosedur pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa melalui rapat tahunan maupun papan pengumuman di kantor desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan. Faktor pertama adalah kompetensi aparatur desa. Kemampuan teknis dan pemahaman aparatur terhadap akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Aparatur yang telah

memiliki pengalaman kerja dan pernah mengikuti pelatihan cenderung lebih mampu menyusun laporan keuangan dengan lebih baik, sedangkan aparatur yang relatif baru masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan.

Faktor kedua adalah dukungan teknologi. Keterbatasan sarana seperti komputer dan sistem informasi akuntansi menyebabkan sebagian proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berpengaruh terhadap efisiensi dan kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Walaupun Desa Pangurdotan telah memanfaatkan Microsoft Excel serta mulai menerapkan aplikasi Siskeudes dan SID, dukungan teknologi yang tersedia masih perlu ditingkatkan agar proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih optimal.

Faktor ketiga adalah dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis. Pendampingan dari pihak kecamatan dan pemerintah daerah membantu aparatur desa dalam memahami penerapan SAP serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan laporan. Dalam praktiknya, dukungan ini sangat penting karena aparatur desa masih membutuhkan arahan teknis, khususnya dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, faktor pelatihan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap SAP, meskipun pelatihan yang diberikan masih bersifat umum. Pelatihan yang berkelanjutan dan lebih spesifik dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan secara lebih tepat. Faktor terakhir adalah motivasi aparatur desa. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi mendorong aparatur untuk lebih teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan desa.

### **Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Pangurdotan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan memberikan dampak terhadap transparansi laporan keuangan desa. Dampak tersebut terlihat dari adanya keterbukaan dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung memudahkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Laporan keuangan desa juga telah dipublikasikan melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara lebih terbuka. Penyajian laporan yang lebih terstruktur membantu meningkatkan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan desa.

Secara teoritis, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Selain itu, Mahmudi (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan,

andal, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sejalan dengan pandangan tersebut, penerapan SAP di Desa Pangurdotan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang disusun menjadi lebih rapi, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan yang disajikan, sehingga transparansi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal.

## **Pembahasan**

### **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Desa Pangurdotan**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan telah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun tingkat implementasinya masih bervariasi pada beberapa aspek. Laporan keuangan desa sudah mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip SAP, namun pencatatan aset tetap dan dokumentasi bukti transaksi masih belum sepenuhnya lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah desa telah berupaya menerapkan SAP dalam pengelolaan keuangan, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan teknis yang perlu diperbaiki agar penerapan standar tersebut menjadi lebih optimal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putri (2022), yang menekankan pentingnya kompetensi aparatur desa sebagai faktor utama keberhasilan penerapan SAP. Dalam konteks Desa Pangurdotan, kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang memengaruhi konsistensi pencatatan dan pelaporan keuangan. Aparatur desa yang memiliki pemahaman akuntansi pemerintahan yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan tugas pencatatan secara tertib, sedangkan aparatur yang masih terbatas pengetahuannya memerlukan pendampingan tambahan dalam proses pelaporan.

Selain itu, sistem pencatatan di Desa Pangurdotan sebagian besar masih dilakukan secara manual, meskipun beberapa perangkat desa telah menggunakan aplikasi keuangan sederhana dan bantuan program komputer. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas dan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan SAP. Temuan ini sesuai dengan penelitian Sari dan Hermanto (2019), yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, keterbatasan sarana teknologi dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pelaporan yang lebih efektif, akurat, dan efisien.

Penerapan SAP di Desa Pangurdotan juga dipengaruhi oleh komitmen aparat desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo (2021), yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan aparat terhadap SAP sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini terlihat bahwa aparatur desa telah menunjukkan komitmen untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan, namun dukungan pendampingan dari pihak kecamatan masih diperlukan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Selain aspek teknis dan komitmen aparatur, budaya organisasi dan koordinasi internal aparatur desa juga turut memengaruhi penerapan SAP. Penelitian Nifanngeljau et al. (2020) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung akan mempermudah proses

implementasi SAP. Hal ini tampak di Desa Pangurdotan, di mana koordinasi antarpegawai desa masih perlu ditingkatkan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, penerapan SAP di Desa Pangurdotan pada dasarnya telah berjalan sesuai prinsip-prinsip dasar, tetapi masih memerlukan penguatan pada kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pengawasan internal agar laporan keuangan desa menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan**

Penerapan SAP di Desa Pangurdotan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal organisasi maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, kompetensi aparatur desa menjadi faktor yang sangat krusial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian aparatur memiliki pengetahuan dasar mengenai SAP, tetapi pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi pemerintahan masih terbatas. Temuan ini sesuai dengan Putri (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP. Artinya, keberhasilan pelaksanaan SAP di tingkat desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi secara benar.

Selain kompetensi, komitmen dan budaya organisasi juga memegang peran penting. Aparatur desa yang memiliki disiplin kerja, koordinasi yang baik, dan budaya kerja yang akuntabel cenderung lebih mampu menerapkan SAP secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan Nifanngeljau et al. (2020) dan Primadi Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen pemerintah desa merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi SAP. Dalam konteks Desa Pangurdotan, komitmen aparatur terlihat dari upaya mereka untuk tetap menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan meskipun menghadapi keterbatasan kemampuan teknis dan sarana pendukung.

Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap penerapan SAP, terutama dukungan teknis dan kejelasan regulasi dari pemerintah. Ketersediaan perangkat lunak akuntansi sederhana serta adanya pedoman regulasi yang jelas membantu aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Temuan ini sejalan dengan Kuncahyo dan Dharmakarja (2014) serta Akuntabilitas et al. (2024), yang menyatakan bahwa dukungan teknis dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap percepatan penerapan SAP di tingkat desa. Dalam penelitian ini, peran pemerintah daerah melalui pendampingan dan bimbingan teknis terbukti membantu aparatur desa dalam menyesuaikan praktik pengelolaan keuangan dengan standar yang berlaku.

Selain itu, kondisi ekonomi desa juga memengaruhi kesiapan aparatur dalam menjalankan SAP, terutama yang berkaitan dengan pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung. Temuan ini sejalan dengan Aldiyah Rizky (2022), yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi desa memengaruhi kesiapan implementasi SAP. Keterbatasan anggaran dapat menghambat penyediaan sarana teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, kesiapan keuangan desa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mendukung implementasi SAP secara maksimal.

Pengawasan internal yang efektif juga menjadi faktor penting dalam menunjang penerapan SAP. Pengawasan yang berjalan dengan baik mampu memastikan ketepatan pencatatan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan Ilhami dan Widhiastuti (2022), yang menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap transparansi keuangan desa. Dengan demikian, penerapan SAP di Desa Pangurdotan ditentukan oleh kombinasi faktor internal seperti kompetensi, komitmen, dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti regulasi, dukungan teknis, kondisi ekonomi, dan pengawasan internal. Keseimbangan antara berbagai faktor tersebut sangat menentukan sejauh mana laporan keuangan desa dapat disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah.

### **Analisis Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Pangurdotan**

Penerapan SAP di Desa Pangurdotan berdampak signifikan terhadap transparansi laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP menjadi lebih rapi, sistematis, dan lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat desa dan pihak pengawas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan SAP tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan keterbukaan informasi keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Hermanto (2019), yang menegaskan bahwa sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi keuangan desa.

Selain itu, akuntabilitas aparatur desa juga mengalami peningkatan karena SAP menuntut adanya pencatatan transaksi yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Pengawasan internal yang diterapkan secara konsisten turut memperkuat dampak tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ilhami dan Widhiastuti (2022), yang menyatakan bahwa pengawasan internal memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya standar akuntansi yang diterapkan secara lebih tertib, risiko manipulasi maupun kesalahan pencatatan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa juga meningkat.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya disiplin aparatur desa dalam pelaporan dan penggunaan anggaran. Pengeluaran dan penerimaan desa kini tercatat secara lebih rinci, sehingga mempermudah evaluasi terhadap kinerja keuangan desa. Kondisi ini juga mendukung prinsip transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Akuntabilitas et al. (2024). Dengan demikian, penerapan SAP tidak hanya bersifat prosedural, tetapi secara nyata meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan Desa Pangurdotan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang profesional dan terpercaya. Transparansi laporan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya laporan keuangan, tetapi juga oleh kualitas penyusunan, keterbukaan akses informasi, serta kemampuan aparatur dalam menyajikan laporan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik penerapan SAP, maka semakin besar pula peluang terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP di desa tersebut telah berjalan dengan cukup baik. Aparatur desa telah melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, audit internal dan eksternal, hingga publikasi laporan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti pencatatan yang sebagian masih dilakukan secara manual serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Namun, adanya koordinasi internal yang cukup baik dan pengawasan yang dilakukan secara rutin turut membantu menjaga akurasi dan ketertiban laporan keuangan desa.

Selanjutnya, transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan dapat dikatakan cukup tinggi. Laporan keuangan desa telah dipublikasikan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, rapat desa, penjelasan langsung kepada masyarakat, dan media sosial apabila tersedia. Pola penyampaian informasi seperti ini membuat masyarakat lebih mudah memahami penggunaan anggaran desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta mendorong terwujudnya akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi penerapan SAP, yaitu kualitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, sistem informasi akuntansi, pengawasan internal, pemahaman regulasi, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Aparatur yang kompeten dan komitmen Kepala Desa yang kuat akan mendorong penerapan SAP yang lebih efektif, sedangkan dukungan sarana serta pemahaman regulasi yang baik akan membantu meningkatkan ketepatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Penerapan SAP dalam penelitian ini juga terbukti memberikan dampak positif terhadap transparansi laporan keuangan Desa Pangurdotan. Laporan keuangan menjadi lebih akurat, terstruktur, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, penerapan SAP juga meningkatkan akuntabilitas aparatur desa serta kedisiplinan dalam pelaporan anggaran, sehingga pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penerapan SAP memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Pangurdotan. Pertama, aparatur desa yang baru maupun yang belum berpengalaman perlu memperoleh pelatihan teknis dan pendampingan lanjutan terkait SAP. Pelatihan tersebut sebaiknya disusun secara lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa, serta mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan transaksi yang jarang terjadi maupun pengeluaran yang bersifat mendadak. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akan semakin meningkat.

Kedua, desa sebaiknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak akuntansi dan fasilitas teknologi informasi untuk mendukung percepatan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Penyediaan komputer, printer, serta perangkat lunak akuntansi yang memadai akan membantu meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kemudahan dalam proses audit maupun pertanggungjawaban keuangan. Ketiga, pendampingan dari pihak kecamatan dan dinas terkait perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Bimbingan teknis yang konsisten akan sangat membantu aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip SAP dan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, terutama bagi aparatur yang masih baru atau belum memiliki pengalaman yang memadai.

Selain itu, laporan keuangan desa sebaiknya disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian laporan tersebut perlu terus dipublikasikan melalui berbagai media, seperti rapat desa, papan pengumuman, dan media sosial, agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan meningkat, dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan juga akan semakin kuat.

## Referensi :

- Ardiyanti, Rika. 2019. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. In *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 10, Issue 2, pp. 185–198).
- Kartikaningtyas, A. P., & Abdurahim, A. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.16>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Nifanngeljau, J., Rifa'i, M., & Iriani, N. I. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN RUMAH TANGGA TANI DI KOTA BATU (Studi di Desa Tlekung Kecamatan Jonreju Kota Batu). *Buana Sains*, 19(2), 53. <https://doi.org/10.33366/bs.v19i2.1749>
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1), 147–153. <https://doi.org/10.35760/eb.2008.v13i1.321>
- Putra, R., Sari, M., & Andini, L. 2021. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 101–112. <https://doi.org/10.60079/aaar.v3i1.420>
- Putri, K. R. D. (2022). Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Penerapan Spip, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. In *Skripsi*. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24895>
- Sari, E. M., & Hermanto, S. B. (2019). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Administratif

- Terhadap Efisiensi Alokasi Dana Desa. Dimediasi akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1-22.
- Sinulingga, J. I. S. B. (2024). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat).
- Siregar, B. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 23-34. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i3.36453>.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S., & Sari, R. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 45-58. <https://doi.org/10.33830/jipa.v2i1.12884>
- Wijaya, A., & Sari, D. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 75-88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>